PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

RENCANA KERJA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RENJA – PD)
TAHUN 2018

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. SUROHADIKUSUMO NO 1 PEMALANG

2017

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang
Nomor : 050.4/26/2017
Tanggal : 3 Juli 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam perkembangannya diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, membawa konsekuensi perubahan serta penyempurnaan mekanisme dan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektif.

Perencanaan Pembangunan yang disusun oleh Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah - dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang - bertujuan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, agar perencanaan pembangunan tersebut dapat tersusun dengan baik dan tepat sasaran, maka perlu adanya pedoman Perencanaan Pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun dengan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk

mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan dokumen yang harus disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, karena Dinas Komunikasi dan Informatika adalah lembaga yang sebagian besar kegiatannya secara langsung berhubungan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dari dokumen Rencana Kerja Dinas, Komunikasi dan Informatika inilah akan dapat dilihat seberapa besar perhatian Pemerintah Kabupaten Pemalang terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Undang-UNdang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Perataruan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang (lembaran daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 9)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021,
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang,
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang,
21. Peraturan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Nomor 050.03/24/Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021

1.3 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 disusun bedasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I : **Pendahuluan**, memuat perihal latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II : **Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu**, memuat perihal evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, analisis kinerja pelayanan OPD, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

BAB III : **Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan PD**, memuat perihal telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, serta program dan kegiatan.

BAB IV : **Penutup**

1.4 Maksud dan Tujuan

Proses perencanaan membutuhkan kontinuitas untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai penjabaran serta tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018. Sebagai suatu dokumen rencana kerja, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Adapun maksud penyusunan Renja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 antara lain adalah :

a. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
b. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan OPD;
c. Menyediakan acuan resmi bagi OPD dalam menyusun Rencana Anggaran dan Kegiatan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja OPD adalah :

a. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD;
b. Untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah;
c. Untuk mengukur capaian target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja OPD;

d. Sebagai acuan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Pemalang kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD;
e. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Pemalang. Secara de fakto Dinas Komunikasi dan Informatika ada sejak dilantiknya Para Pejabat di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada tanggal 3 Januari 2017. Dengan demikian Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mulai melaksanakan tugasnya sejak tanggal 3 januari 2017.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas, Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 -2021 baru disusun pada Tahun 2017. Sehingga, pada penyusunan Renja 2018 ini tidak dapat dievaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2016. Namun demikian akan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan pada tupoksi sejenis yang ada pada Bidang Komunikasi dan Informatika di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bagian Hubungan Masyarakat dan Bagian Umum Setda, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pemalang.

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang, Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

2. Fungsi

Didalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya,
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Kewenangan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016, bahwa kewenangan desentralisasi yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang adalah :

a. bidang komunikasi dan informatika.
b. Bidang persandian.
c. Bidang statistik

4. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Bagian Ketiga, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Kepala Dinas,
b. Sekretariat terdiri dari
   1 Subbagian Bina Program dan Keuangan,
   2 Subbagian Umum dan Kepegawaian,
c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdm dan
   1 Seksi Informasi Publik,
   2 Seksi Komunikasi Publik,
d. Bidang Penyelenggaraan *E-Government* terdiri dari
   1 Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government*,
   2 Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Government*,
e. Bidang Pos, Telekomumkasi dan Statistik terdiri dari
   1 Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian;
   2 Seksi Statistik,
f. UPTD,
g. Kelompok Jabatan Fungsional

LAMPIRAN ---
PERATURAN DAERAH KABUPATENPEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2016
TANGGAL 22 AGUSTUS 2016

SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PEMALANG

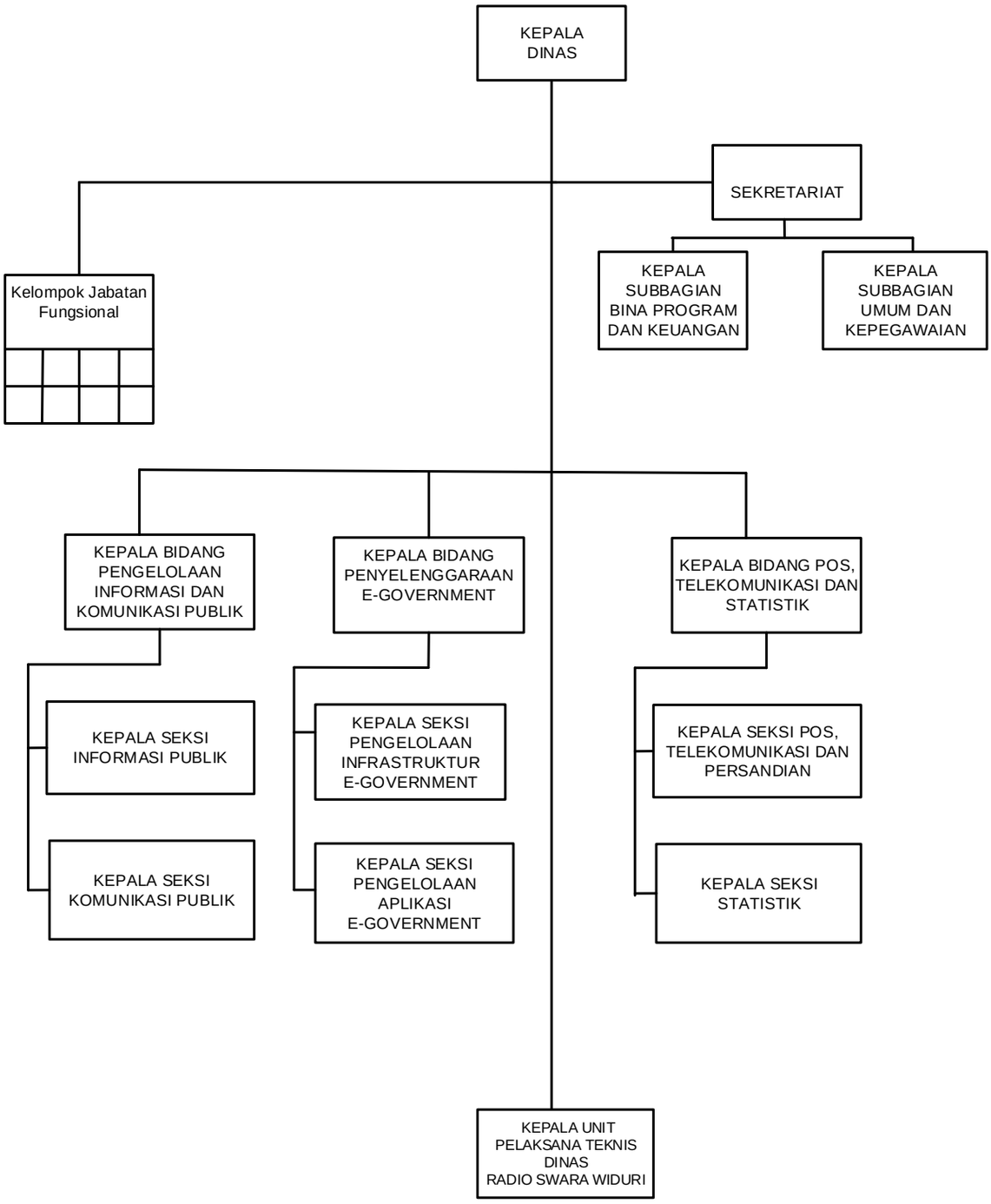

NB. Dasar pembuatan
1. FGD di surakarta
2. Perumpunan Urusan dan Urtug berdasarkan pp 18/2016

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Uraian Tugas Pejabat Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Diskominfo

Kepala Diskominfo mempunyai uraian tugas sebagai benkut:

1. menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Keija Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan Rencana Keija dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
2. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. merumuskan kebijakan tekms urusan pemenntahan bidang komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. merumuskan inovasi daerah urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
6. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerinntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
7. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi,
8. mengarahkan pengelolaan Administrasi Umum, Perencanaan Program dan Anggaran, Ketatausahaan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang komumkasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmerja;
10. merumuskan laporan di bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

B. Sekretaris

Sekretaris Diskominfo mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan kesekretariatan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. mengkoordinasikan usulan Rencana Strategic (Renstra), Rencana Kinerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemenntah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3. menyusun rancangan kebijakan kesekretanatan sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4. menyelenggarakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan serta Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan,
5. mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
6. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) urusan pemenntahan bidang komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
7. menyusun konsep inovasi kesekretariatan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
8. mengoordinasikan konsep inovasi dan pelaksanaan tugas bidang-bidang guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
9. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kesekretanatan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
10. mengkoordinasikan penyusunan laporan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan basik laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a. Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan

Kepala Subbagian Bina Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut

1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bah an penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2) menyusun usulan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Keija (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan,
3) melaksanakan pengelolaan administrasi bina program dan keuangan sesuai dengan pedoman perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah guna tertib admimstrasi,
4) mengelola data urusan pemerintahan komunikasi dan mformatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah guna pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
5) melaksanakan kegiatan venfikasi dan pencairan anggaran sesuai surat pertanggungjawaban keuangan guna pengendalian pengelolaan keuangan,

6) menyusun konsep dokumen pertanggungjawaban kinerja yang meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjlP), Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dokumen pertanggung]awaban lainnya sesuai dengan panduan pembuatan laporan sebagai bahan pertanggung]awaban,
7) menyusun konsep laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), serta laporan keuangan lainnya sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah guna tertib administrasi,
8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Bina Program dan Keuangan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik,
9) melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP**)** urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemenntah (SPIP) dalam rangka pengendalian internal kegiatan,
10) mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Bina Program dan Keuangan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
11) menyusun bahan laporan urusan pemerintahan komunikasi dan informatika, persandian serta statistik dan hubungan masyarakat berdasarkan hasil laporan sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
12) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lgkungan Subbagian Bina Program dan Keuangan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai benkut

1) merencanakan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2) mengelola admimstrasi umum meliputi surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
3) mengelola administrasi kehumasan meliputi keprotokolan dan informasi publik secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
4) mengelola administrasi kerumahtanggaan meliputi pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor, fasilitasi penyelenggaraan rapat dinas, dan barang milik daerah secara efektif guna kelancaran pelaksanaan tugas,
5) mengelola ketatalaksanaan meliputi penyusunan sistem dan prosedur keija sesuai dengan target kerja guna kelancaran pelaksanaan tugas,
6) mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan peraturan kepegawaian guna tertib admimstrasi,
7) melaksanakan penyediaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik,
8) menyiapkan bahan inovasi Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan memngkatkan kualitas pelayanan publik,
9) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmeija,

10) menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Subbagian Umum dan Kepegawaian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

C Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan program dan kegiatan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan orgamsasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2) menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Informasi Publik dan Komunikasi Publik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Informasi Publik dan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4) menyusun konsep inovasi urusan pemenntah bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5) mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara penodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6) mengevaluasi pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7) menyusun laporan pelaksanaan tugas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a Kepala Seksi Informasi Publik

Kepala Seksi Informasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai
Berikut

1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2) menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyusun rancangan kebijakan Seksi Informasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
4) menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
5) melaksanakan. pengelolaan informasi publik serta hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah sesuai prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran informasi publik serta hubungan masyarakat dengan Pemerintah Daerah,
6) melaksanakan kegiatan reproduksi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keselarasan antara informasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

7) melaksanakan kegiatan pelayanan, fasilitasi dan penyebarluasan informasi dan dokumentasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik,
8) melaksanakan diseminasi informasi nasional sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebaran informasi,
9) melaksanakan pengelolaan pemutakhiran materi dan konten situs Pemenntah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna pemutakhiran informasi publik,
10) melaksanakan publikasi kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyebarluasan informasi,
11) menyusun rancangan inovasi Seksi Informasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
12) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
13) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
14) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b Kepala Seksi Komunikasi Publik

Kepala Seksi Komunikasi Publik mempunyai uraian tugas sebagai berikut

1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran,
2) menyusun rancangan kebanyakan Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyusun konsep rancangan Rencana Induk Strategi Informasi dan Komumkasi Publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4) melaksanakan pengelolaan komumkasi publik serta hubungan masyarakat Pemenntah Daerah sesuai dengan prosedur dan. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas saluran komunikasi publik serta hubungan masyarakat Pemerintah Daerah,
5) melaksanakan kegiatan audit komumkasi publik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dalam rangka mengontrol komunikasi publik,
6) melaksanakan kegiatan kemitraan komunikasi dengan media sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk meningkatkan kerjasama,
7) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya komumkasi perangkat daerah dan badan usaha milik daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas,
8) melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah maupun masyarakat sesuai dengan prosedur teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya TIK,
9) melaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik Pemenntah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna efektifitas dan efisiensi komunikasi publik,
10) melaksanakan kegiatan pembinaan saluran komunikasi non pemenntah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pengelolaan

saluran komunikasi non pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan,

11) melaksanakan kegiatan pembinaan kelembagaan komunikasi sosial sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan komunikasi sosial,
12) menyusun rancangan inovasi Seksi Komunikasi Publik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13) mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmerja,
14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Komunikasi Publik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

D. Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government*

Kepala Bidang Penyelenggaraan *E-Government* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan organisasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kinerja dan anggaran,
2) menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Pengelolaan Aplikasi *E-Government* sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Infrastruktur E-Government dan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Goverment* sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4) menyusun konsep inovasi urusan pemerintah Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
5) mengkoordmasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E- Goverment* secara periodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6) mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kmerja,
7) menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggaraan *E- Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8) melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Goverment*

Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Goverment* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Goverment* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,

4. melaksanakan pengelolaan *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Government* yang baik,
5. melaksanakan pengelolaan mfrastruktur dasar Pusat Data (Data Center), *Disaster Recovery Center* dan Teknologi Informatika dan Komputer (TIK) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan standar minimal penyelenggaraan *E-Government,*
6. melaksanakan pengelolaan intranet Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan komunikasi data yang baik antar perangkat daerah,
7. menyiapkan penyediaan layanan akses internet dan intranet sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan guna penyebaran akses informasi,
8. melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi dan komunikasi komputer (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung pengembangan *E-Government,*
9. melaksanakan kegiatan penyusunan Standar Sistem Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna. penyelarasan sumber daya teknologi dan komunikasi komputer (TIK) Pemermtah Daerah,
10. menyusun rancangan inovasi Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E- Government* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekeijaan dan memngkatkan kualitas pelayanan publik,
11. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12. menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Infrastruktur *E-Government* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpiman sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b. Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment*

Kepala Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1) merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana keija dan anggaran,
2) menyusun rancangan kebijakan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E- Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3) menyusun konsep rancangan Rencana Induk *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4) melaksanakan pengelolaan nama domain dan sub domain situs Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna penyelarasan dengan ketentuan Pemerintah Pusat,
5) melaksanakan pengelolaan interoperabilitas dan interkoneksi aplikasi dan database *E-Government* Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam memanfaatkan *E-Goverment,*
6) melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk

mewujudkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah yang terintegrasi,

7) melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi genenk, spesifik dan suplemen sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan integrasi aplikasi,
8) melaksanakan pengelolaan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan *Smart City,*
9) melaksanakan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola *E-Goverment* yang baik,
10) melaksanakan pengelolaan Situs Web Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi dan komunikasi publik yang baik,
11) melaksanakan pengelolaan aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara elektronik (e-LPPD) sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan pelaporan,
12) menyusun rancangan inovasi di lmgkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
13) mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
14) menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengelolaan Aplikasi *E-Govemment* secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

E. Kepala Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik

Kepala Bidang Pos, Telekomumkasi dan Statistik mempunyai uraian
Tugas sebagai benkut:

1. merencanakan program dan kegiatan bidang Pos, Telekomumkasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai pedoman pelaksanaan dan kebutuhan orgamsasi sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun konsep rancangan kebijakan bidang Pos, Telekomumkasi dan Persandian serta bidang Statistik sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyelenggarakan program dan kegiatan Seksi Pos, Telekomumkasi dan Persandian serta Seksi Statistik sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar tepat sasaran dan tujuan,
4. menyusun konsep inovasi urusan pemenntah Bidang Pos, Telekomumkasi dan Statistik sesuai dengan ketentuan dan perkembangan teknologi untuk memngkatkan kualitas pelayanan publik;
5. mengkoordmasikan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomunikasi dan Statistik secara penodik dan terpadu guna keterpaduan pelaksanaan tugas,
6. mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomumkasi dan Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
7. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pos, Telekomumkasi dan Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
8. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpman sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

a Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian

Kepala Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian mempunyai uraian tugas sebagai benkut

1. merencanakan program dan kegiatan pada Seksi Pos, Telekomumkasi dan Persandian sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran,
2. menyusun rancangan kebijakan Seksi Pos, Telekomumkasi dan Persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
3. menyusun konsep rancangan Rencana Induk Pola Hubungan Komunikasi Sandi dan Pengamanan Informasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksanaan pembangunan,
4. melaksanakan pengendalian dan penertiban terhadap penyelenggaraan standardisasi dan perizinan pos dan telekomunikasi di daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna peningkatan pelayanan publik;
5. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan hubungan komunikasi sandi dan pengamanan mformasi yang bersifat lokal sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan guna peningkatan pengetahuan dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pos, telekomunikasi dan persandian,
6. melaksanakan pengelolaan keamanan mformasi *E-Government* sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan untuk mewujudkan keamanan komunikasi data Pemerintah Daerah,
7. melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk mewujudkan akuntabilitas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah,
8. mengoordinasikan penetapan, pemberlakuan dan penghapusan kunci sistem sandi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan,
9. melaksanakan kegiatan tata kelola dan perlindungan mformasi berklasifikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk pengamanan informasi,
10. melaksanakan kegiatan penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia Sandi, Matriil Sandi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS) baik melalui asistensi, workshop, pelatihan, seminar dan/atau bimbingan teknis persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan kualitas kerja
11. melaksanakan pengelolaan pusat data persandian sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna ketersediaan informasi publik
12. melaksanakan kegiatan pengukuran dan evaluasi penyelenggaraan persandian dan tmgkat keamanan informasi secara internal pada masing-masing perangkat daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjaga informasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah,
13. melaksanakan pengelolaan materiil, sarana, prasarana dan infrastruktur persandian untuk pengamanan informasi dengan berpedoman pada Peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara untuk kelancaran pelaksanaan tugas,
14. melaksanakan pelayanan satu pintu pengiriman dan penerimaan informasi berklasifikasi di lmgkungan pemerintah daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk efektivitas pelaksanaan kerja,
15 mengelola kegiatan pemulihan data dan gangguan jaringan sistem informasi dengan menjaga integntas dan ketersediaan data,
16 mengelola Secunty Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna perlindungan data,

17 menyusun rancangan movasi Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
18 mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
19 menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Pos, Telekomunikasi dan Persandian secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
20 melaksanakan tugas kedinasan lain yang dibenkan oleh pimpinan esuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi

b Kepala Seksi Statistik

Kepala Seksi Statistik mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1 menyusun konsep rancangan program dan kegiatan pada Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
2 menyusun rancangan kebijakan Seksi Statistik sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas
3 mengindentifikasi data, dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk keterpaduan data dalam pelaksanaan survey,
4 menyusun metode survey dan petunjuk tekms pelaksanaan survey sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh hasil survey yang akurat,
5 melakukan konsultasi dan mengkoordinasikan persiapan penyelenggaraan survey pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna keterpaduan pelaksanaan kegiatan,
6 melaksanakan kegiatan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan prosedur dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk memperoleh data statistik sektoral yang valid dan akurat,
7 menyusun data hasil survei pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan sistem dan program yang ditetapkan untuk diolah menjadi laporan hasil survey,
8 mempersiapkan bahan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei pengelolaan urusan pemermtahan yang menjadi kewenangan daerah untuk menjadi bahan masukan dan perbaikan kegiatan survei maupun kebijakan pada masa akan datang,
9 mengidentifikasi konsep pengembangan metodelogi survei, diseminasi statistik dan sistem informasi pengelolaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka meningkatkan mutu data statistik,
10 menyusun rancangan inovasi Seksi Statistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,
11 mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Statistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja,
12 menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi Statistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
13 melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Sumber Daya Manusia

Per 10 Pebruari 2017, Personil pada Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan struktur :

1) Jumlah Struktural :

a) Eselon II/B : 1 orang

b) Eselon III/A : 1 orang

c) Eselon III/B : 3 orang

d) Eselon IV/A : 8 orang

2) Jumlah Pelaksana :

Pelaksana : 31 orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang, terdiri dari :

1) Pembina Tingkat I (IV/b) : 2 orang

2) Pembina (IV/a) : 2 orang

3) Penata Tingkat I (III/d) : 6 orang

4) Penata (III/c) : 1 orang

5) Penata Muda Tingkat I (III/b) : 14 orang

6) Penata Muda (III/a) : 5 orang

7) Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang

8) Pengatur (II/c) : 6 orang

9) Pengatur Muda Tingkat I (II/b) : 5 orang

10) Pengatur Muda (II/a) : 2 orang

1) Sarjana Strata 2 : 2 orang

2) Sarjana Strata 1/Diploma IV : 17 orang

3) Diploma III : 1 orang

4) SLTA : 24 orang

c. Sedangkan Tenaga/Pegawai Honorer pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1) Petugas fotografer : 1 orang

2) Petugas Kantor : 2 orang

3) Petugas Penyiar Radio : 1 orang

Dari keseluruhan pegawai (PNS) sebanyak Apabila dilihat dari struktur kepangkatan dan tingkat pendidikan, maka SDM Dinas Komunikasi dan Informatika cukup representatif, dimana 70 % pegawai bergolongan III, dan 60 % berpendidikan SLTP – SLTA.

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk dapat memberikan pelayanan yang baik, kinerja aparat/petugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang didukung dengan adanya sarana dan prasarana.

Sarana dan prasarana tersebut diantaranya Studio Radio Swara Widuri, dan peralatan kamera dan tustel. Selain itu juga beberapa set komputer sebagai sarana pendukung administrasi perkantoran. Sedangkan prasarana yang ada berupa Gedung Kantor Pelayanan Administrasi, dan Gedung LPPL Swara Widuri.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada Dinas, Komunikasi dan Informatika didukung sebagai berikut :

Tabel.1.

Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Jenis	Jumlah
1	Komputer	15 unit
2	Laptop	6 Unit
3	LCD	2 unit
4	Telepon	3 unit
	Mesin Fax	1 unit
	Instalasi Telepon, Fax, PABX	2 unit
5	Televisi	3 buah
6	AC	14 buah
7	Almari	26 buah
8	Meja Kerja Eselon II	1 buah
9	Meja dan Kursi Kerja	61 buah
10	Kursi Rapat	62 buah
11	Meja dan Kursi Tamu	3 set
12	Mesin Tik	2 buah
13	Filling Cabinet	16 buah
14	Kendaraan Roda-4	3 buah
15	Kendaraan Roda-2	3 buah
16	Tape Recorder/Wireless	10 buah
18	Kamera Digital	3 buah
19	Pesawat HT + Rig	2 unit
20	Kamera drone	1 unit
21	Video switcher	1 unit
22	megaphone	1 unit
23	HP/notebook	4 unit

Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. SPM bidang Komunikasi dan Informatika

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, pelayanan dasar adalah jenis pelayanan public yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan dalam kehidupan social, ekonomi dan pemerintahan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, dan ditetapkannya PD baru secara serentak di Indonesia, saat ini Kementrian Komunikasi dan Informatika bersama dengan Kementrian Dalam Negeri tengah menyusun draft Norma,Standar,Perilaku Kerja (NSPK) sebagai pengganti SPM. Adapun SPM lama yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika , Kabupaten Pemalang dan Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Pemalang adalah jenis pelayanan dasar, yakni Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional dan Pengembangan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dilaksanakan oleh Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Tabel.2.

Hasil Evaluasi SPM bidang Komunikasi dan Informatika

No	Jenis Pelayanan Dasar & Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Tahun					Status
		Indikator	Nilai		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional melalui :		2020						
		a. Media Massa seperti majalah, radio, dan televisi;	1 kali/th	2020	0					
		b. Media baru seperti website (media onilne);	4 kali/th	2020	4i					OK
		c. Media tradisionil seperti pertunjukan rakyat;	1	2020	1					OK
		d. Media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya;	0	2020	0					
		e. Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho;	3	2020	2					OK
2	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Keompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	50%	2020	50%					OK

SPM bidang Komunikasi dan Informatika terbagi atas 6 indikator. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang melaksanakan 5 indikator, Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Pemalang melaksanakan 1 indikator. Dari 6 indikator, sebanyak 4 indikator telah mencapai target SPM, sedangkan 2 indikator belum mencapai target dikarenakan minimnya kegiatan dan pendanaan.

1.4. Evaluasi terhadap Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD

Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021. Target dan Realisasi Capaian indikator kinerja daerah untuk Urusan Komunikasi dan Informatika, persandian dan Statistik yakni Cakupan Pelayanan TI bagi masyarakat (titik hotspot target 3 titik) telah ada 3 titik hotspot yakni di Balai Desa Cibuyur, dan alun-alun (seputar perpustakaan Kabupaten Pemalang), dan Balai Desa Majalangu. Namun hotspot yang dibangun tersebut merupakan anggaran bantuan dark Kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015.

1.5. Evaluasi Target Anggaran, Realisasi dan Pelaksana Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik

Target Anggaran Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 sebesar Rp. 5.868705.000.000,00 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Bagian Hubungan Masyarakat Setda kabupaten Pemalang, Bagian Umum setda, Sekretariat DPRD. Adapun realisasinya sebesar RP. 5.306.773.982,00 atau 90,42%. Anggaran tersebut untuk mendukung 11 program dan 23 kegiatan. Program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang tahun 2016 untuk urusan Komunikasi dan Informatika yakni Cakupan Pelayanan TI bagi masyarakat, dengan target titik hotspot yang tebangun sejumlah 3 titik pada tahun 2016 belum dilaksnakan dengan anggaran APBD namun telah ada tiga titik hotspot yang merupakan bantuan dari kementrian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 yakni di Balai Desa Cibuyur, Seputaran alun-alun dan Balai Desa Majalangu.

Target anggaran Urusan Statistik sebesar RP.223.370.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.223.240.000,00 atau 96,7% diilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pemalang untuk mendukung 1 program dan 1 kegiatan.

1.6 Permasalahan dan solusi

Secara umum Urusan komunikasi dan informatika pada tahun 2016 tidak terdapat permasalahan yang cukup berarti. Adapun untuk urusan Statistik permasalahannya adalah indikator makro tidak bisa disajikan secara tepat waktu. Oleh karena itu, merekomendasikan kepada BPS agar menyediakan data indikator makro secara tepat waktu.

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)		Catatan Analisis
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Terkendalinya penggunaan menara telekomunikasi			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	Target tercapai
2	Tersedianya peralatan multimedia			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0	0	100,00	100,00	Target tidaktercapai
3	Terpenuhinya aplikasi software dan informasi melalaui internet			2 paket	2	2 paket	2 paket	0	0	100,00	100,00	Target tidaktercapai
4	Tersedianya regulasi dan kebijakan TI			1 paket	2	1 paket	1 paket	0	0-	100,00	100,00	Target tidaktercapai
5	Tersedianya sarana dan prasarana kominfo			1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100,00	100,00	100,00	100,00	Target tercapai
6	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana kominfo			3 paket	3 paket	3 paket	3 paket	100,00	100,00	100,00	100,00	Target tercapai
7	Terlaksananya pelatihan SDM bidang kominfo			100 orang	100 orang	100 orang	100 orange	0	0	100,00	100,00	Target tidaktercapai
8	Terlaksananya publikasi			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	Target tercapai
9	Terlaksananya pelayanan multimedia			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	Target tercapai
10	Terlaksananya diseminasi informasi			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	Target tercapai
11	Terpenuhinya fasilitasi KIM dan Forum TI			2 kgt	2 kgt	2 kgt	2 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	Target tercapai
12	Terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan website			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100,00	100,00	100,00	100,00	Target tercapai
13	Jumlah Pengadaan peralatan Studio dan komunikasi dan dokumentasi yang tersedia			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	100%	100%	100	100	Target tercapai

14	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala srana dan prasarana alat komunikasi dan dokumentasi			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	95,06%	95,06%	100	100	Target tercapai
15	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan publik speaking dan keprotokolan			0	2 kgt	2 kgt	2 kgt	86,84%	86,84%	100	100	Target tercapai
16	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan			2 kgt	3 kgt	2 kgt	2 kgt	87,30	87,30%	100	100	Target tercapai
17	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui media cetak dan elektronik			90 kgt	96 kgt	100 kgt	100 kgt	100	94,90	100	100	Target tercapai
18	Jumlah penyebarluasan informasi melalui penerbitan majalah pemalang ikhlas dan tabloid			5 kgt	6 kgt	10 kgt	10 kgt	90	95,14%	100	100	Target tercapai
10	Terfasilitasinya pendayaguna an media center dan layanan pengaduan masyarakat melalui SMS center			12 kgt	12 kgt	12 kgt	12 kgt	50	49,89%	100	100	Target tercapai
21	Jumlah kegiatan pemerintah darah yang terdokumentasi kan dalam bentuk foto, video CD, kliping, buku himpunan sambutan Bupati dan video profil / dokumenter.			600 kgt	832 kgt	800 kgt	800 kgt	80	93,39%	100	100	Target tercapai
22	Jumlah informasi publik melalui iklan layanan masyarakat dan publikasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah			50 kgt	69 kgt	70 kgt	70 kgt	80	99,61%	100	100	Target tercapai
23	Jumlah dialog interaktif yang disiarkan melalui radio dan televisi				70 kgt	70 kgt	70 kgt	90	78,36%	100	100	Target tidaktercapai
24	Jumlah rapat PPID dan PPID Pembantu, fasilitasi sengketa informasi dan fasilitasi update informasi publik			7 kgt	7 kgt	10 kgt	10 kgt	90	84,98%	100	100	Target tidaktercapai
25	Jumlah kegiatan yang dikelola LPPL Radio Swara Widuri				120 kgt	120	120	90	80,32%	100	100	Target tidaktercapai

26	Jumlah buku statistik yang diterbitkan			1 kgt	1 kgt	1 kgt	1 kgt	90	96,07%	100	100	

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Isu dan Masalah Mendesak

Isu dan permasalahan yang mendesak saat ini berkenaan dengan urusan komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di wilayah Kabupaten Pemalang adalah sebagai berikut:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. belum meratanya akses masyarakat terhadap informasi;
b. masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informatika;
c. belum meratanya pengetahuan dan ketrampilan masyarakat terhadap teknologi informasi.
d. belum adanya regulasi pengembangan E-Goverment Pemerintah Kabupaten Pemalang
e. belum terintegrasinya data sistem elektronik pemerintah Kabupaten Pemalang
f. belum terintegrasinya pengelolaan aplikasi di lingkungan SKPD/OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang

2. Urusan Persandian

a. Masih kurangnya kesadaran keamanan informasi pejabat negara dan Aparatur Sipil Negara;
b. Adanya kerawanan dan ancaman perusakan sistem komunikasi elektronik, aplikasi server dan data center;
c. Adanya kerawanan dan ancaman keamanan jaring komunikasi pejabat negara dan OPD Pemerintah Kabupaten Pemalang
d. Terbatasnya fasilitas peralatan persandian.

3. Urusan Statistik

a. Kurangnya kesadaran masyarakat arti pentingnya data;
b. Terbatasnya/sulitnya akses data pembangunan;
c. Belum optimalnya ketersediaan, validitas, pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data statistik sektoral.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses Rancangan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 berdasarkan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018 yang telah disusun berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Pemalang (RPJMD 2016 - 2021) yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam menyusun Rancangan Renja SKPD juga mendasari pada Renstra PD 2016 – 2021 yang telah disahkan pula. Hal tersebut sebagai dasar dalam penyusunan program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD 2018 dimana besarnya anggaran yang direncanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika disesuaikan dengan

kebutuhan dari kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selaku lembaga yang melayani komunikasi dan informatika, persandian dan statistik di seluruh wilayah Kabupaten Pemalang dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Review yang dilakukan yaitu dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

Berikut adalah tabel review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 dengan hasil analisis kebutuhan :

Tabel 2.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018
Kabupaten Pemalang

Nama SKPD: **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target Capai an**	**Pagu indikatif**	**Program/Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Kebutuhan Dana**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
A.	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**18.700.000.000**	**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				**18.700.000.000**	
1.	**Komunikasi dan Informatika**				**17.001.800.000**	**Komunikasi dan Informatika**				**17.001.800.000**	
a.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan**	**12 bulan**	**1.011.230.000**	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**		**terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan**	**12 bulan**	**1.011.230.000**	
b.	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemalang	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	3500 surat	50.000.000	Penyediaan jasa surat menyurat	Pemalang	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun	3500 surat	50.000.000	
c.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemalang	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik selama 12 bulan	12 bulan	200.000.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemalang	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik selama 12 bulan	12 bulan	200.000.000	
d.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemalang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ada tersedia selama 1 tahun	12 bulan	20.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pemalang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ada tersedia selama 1 tahun	12 bulan	20.000.000	
e.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin selama 1 tahun	12 bulan	20.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin selama 1 tahun	12 bulan	20.000.000	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun tepat	12 bulan	130.000.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun tepat	12 bulan	130.000.000	
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemalang	Jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhinya selama 1 tahun	12 bulan	40.000.000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pemalang	Jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhinya selama 1 tahun	12 bulan	40.000.000	

	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemalang	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 bulan	25.000.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Pemalang	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 bulan	25.000.000	
	Penyediaan alat tulis kantor	Pemalang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	40.000.000	Penyediaan alat tulis kantor	Pemalang	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	40.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemalang	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	30.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pemalang	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	30.000.000	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemalang	Jumlah komponen listrik yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	76.000.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pemalang	Jumlah komponen listrik yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	76.000.000	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemalang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	43.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemalang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	43.000.000	
	Penyediaan peralatan rumah tangga		Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 paket	30.000.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Pemalang	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 paket	30.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	47.230.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	47.230.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Pemalang	Jumlah bahan logistik yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	32.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Pemalang	Jumlah bahan logistik yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	32.000.000	
	Penyediaan makanan dan minuman	Pemalang	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	48.000.000	Penyediaan makanan dan minuman	Pemalang	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	48.000.000	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Pemalang	Jumlah rapat koodinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti	12 bulan	150.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Pemalang	Jumlah rapat koodinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti	12 bulan	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Keamanan	Pemalang	Jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi tersedia selama 1 tahun	12 bulan	30.000.000	Penyediaan Jasa Keamanan	Pemalang	Jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi tersedia selama 1 tahun	12 bulan	30.000.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		**terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan**	**12 bulan**	**1.540.120.000**	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**		**terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan**	**12 bulan**	**1.540.120.000**	
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat disediakan	1 roda 4, 8 kendar	650.000.000	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat disediakan	1 roda 4, 8 kendaraa	650.000.000	

			aan roda 2					n roda 2	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pemalang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat disediakan	1 paket	38.120.000	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Pemalang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat disediakan	1 paket	38.120.000
Pengadaan peralatan gedung kantor	Pemalang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 paket	67.000.000	Pengadaan peralatan gedung kantor	Pemalang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 paket	67.000.000
Pengadaan mebeleur	Pemalang	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	1 paket	49.500.000	Pengadaan mebeleur	Pemalang	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	1 paket	49.500.000
Pengadaan komputer dan perlengkapanya	Pemalang	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat disediakan	4 laptop	47.000.000	Pengadaan komputer dan perlengkapanya	Pemalang	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat disediakan	4 laptop	47.000.000
Pengadaan alat- alat elektronik	Pemalang	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	1 paket	83.000.000	Pengadaan alat- alat elektronik	Pemalang	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	1 paket	83.000.000
Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Pemalang	Jumlah lemari besi dan feeling cabinet	2 lemari besi	58.000.000	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Pemalang	Jumlah lemari besi dan feeling cabinet	2 lemari besi	58.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemalang	Jumlah gedung yang terpelihara selama 1 tahun	12 bulan	122.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemalang	Jumlah gedung yang terpelihara selama 1 tahun	12 bulan	122.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara selama 1 tahun	12 bulan	89.500.000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemalang	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara selama 1 tahun	12 bulan	89.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemalang	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	12 bulan	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemalang	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	12 bulan	50.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya	Pemalang	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	47.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya	Pemalang	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	47.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Pemalang	Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	34.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Pemalang	Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	34.000.000
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pemalang	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 paket	35.000.000	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Pemalang	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 paket	35.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri	Pemalang	Jumlah gedung kantor LPPL Swara Widuri yang dipelihara	12 bulan	60.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri	Pemalang	Jumlah gedung kantor LPPL Swara Widuri yang dipelihara	12 bulan	60.000.000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor LPPL Swara Widuri	Pemalang	Jumlah perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri yang dipelihara	12 bulan	50.000.000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor LPPL Swara Widuri	Pemalang	Jumlah perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri yang dipelihara	12 bulan	50.000.000
Pemeliharaan rutin peralatan studio LPPL Swara Widuri	Pemalang	Jumlah peralatan studio LPPL Swara Widuri yang dipelihara yang membutuhkan pemeliharaan	1 paket	60.000.000	Pemeliharaan rutin peralatan studio LPPL Swara Widuri	Pemalang	Jumlah peralatan studio LPPL Swara Widuri yang dipelihara yang membutuhkan pemeliharaan	1 paket	60.000.000
Program peningkatan disiplin aparatur		**Prosentase tingkat kedisiplinan ASN**	**100%**	**46.000.000**	**Program peningkatan disiplin aparatur**		**Prosentase tingkat kedisiplinan ASN**	**100%**	**46.000.000**
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pemalang	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	50 stel	46.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pemalang	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	50 stel	46.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		**Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN**	**3,53%**	**406.000.000**	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**		**Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN**	**3,53%**	**406.000.000**
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 kegiatan	100.000.000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 kegiatan	100.000.000
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah bintek yang diikuti dan pelatihan	2 kegiatan	206.000.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pemalang	Jumlah bintek yang diikuti dan pelatihan	2 kegiatan	206.000.000
Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Pemalang	Terkirimnya pegawai pada workshop	1 tahun	100.000.000	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Pemalang	Terkirimnya pegawai pada workshop	1 tahun	100.000.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		**Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia**	**60%**	**214.000.000**	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**		**Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia**	**60%**	**214.000.000**
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	3 laporan	94.000.000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pemalang	Jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	3 laporan	94.000.000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Pemalang	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 laporan	15.000.000	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Pemalang	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 laporan	15.000.000
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemalang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 laporan	15.000.000	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemalang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat	1 laporan	15.000.000

							waktu		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemalang	Jumlah laporan monev	4 laporan	90.000.000	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pemalang	Jumlah laporan monev	4 laporan	90.000.000
Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD	Pemalang	**Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia**	**60%**	**271.000.000**	**Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD**		**Prosentase jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yang tersedia**	**60%**	**271.000.000**
Penyusunan data base perencanaan SKPD	Pemalang	Tersedianya data perencanaan	3 dokumen	131.000.000	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Pemalang	Tersedianya data perencanaan	3 dokumen	131.000.000
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	3 dokumen	140.000.000	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Pemalang	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	3 dokumen	140.000.000
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		**a. Tersedianya DATA CENTER di Kabupaten Pemalang,** **b. Jumlah Penyiaran Radio/Jumlah pengawasan isi siaran Radio,** **c. Cakupan layanan BTS**	**a. 40 %,** **b. 11 Stasiun,** **c. 85 %,**	**5.605.800.000**	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**		**a. Tersedianya DATA CENTER di Kabupaten Pemalang,** **b. Jumlah Penyiaran Radio/Jumlah pengawasan isi siaran Radio,** **c. Cakupan layanan BTS**	**a. 40 %,** **b. 11 Stasiun,** **c. 85 %,**	**5.605.800.000**
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pemalang	Tersedianya data survei indeks kepuasan masyarakat	1 kegiatan	47.000.000	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pemalang	Tersedianya data survei indeks kepuasan masyarakat	1 kegiatan	47.000.000
Pengadaan alat sudio dan komunikasi	Pemalang	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	2 kamera DLSR, 1 kamera video shooting	95.000.000	Pengadaan alat sudio dan komunikasi	Pemalang	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	2 kamera DLSR, 1 kamera video shooting	95.000.000
Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Pemalang	Tersedianya data base sistem informasi	1 dokumen	65.800.000	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Pemalang	Tersedianya data base sistem informasi	1 dokumen	65.800.000
Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi	Pemalang	Tersedianya data base rencana strategis komunikasi publik	2 dokumen	130.000.000	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi	Pemalang	Tersedianya data base rencana strategis komunikasi publik	2 dokumen	130.000.000

dan informasi					dan informasi				
Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Pemalang	Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	12 bulan	60.000.000	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Pemalang	Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	12 bulan	60.000.000
Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Pemalang	Tersedianya layanan pengadaan	layanan selama 1 tahun	350.000.000	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Pemalang	Tersedianya layanan pengadaan	layanan selama 1 tahun	350.000.000
Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Pemalang	Tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	10 aplikasi, 14 titik hotspot, 1 command center	2.030.000.000	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Pemalang	Tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	10 aplikasi, 14 titik hotspot, 1 command center	2.030.000.000
Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Pemalang	Terkoneksinya aplikasi-aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagi pakai	aplikasi 1 kegiatan pelatihan	1.573.000.000	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Pemalang	Terkoneksinya aplikasi-aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagi pakai	aplikasi 1 kegiatan pelatihan	1.573.000.000
Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Pemalang	- Terwujudnya tata kelola domain dan sub domain pemerintah daerah yang aman dan handal - Pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	- 20 website dan 2 sertifikasi keamanan website - 2 website OPD	410.000.000	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	Pemalang	- Terwujudnya tata kelola domain dan sub domain pemerintah daerah yang aman dan handal - Pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	- 20 website dan 2 sertifikasi keamanan website - 2 website OPD	410.000.000
Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	Pemalang	Terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi	- Terpusatnya data base	845.000.000	Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	Pemalang	Terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi	- Terpusatnya data base	845.000.000
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		**Persentase SKPD telah memiliki website (%)**	**56%**	**439.000.000**	**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**		**Persentase SKPD telah memiliki website (%)**	**56%**	**439.000.000**
Asistensi/bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik	Pemalang	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	59.000.000	Asistensi/bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik	Pemalang	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	59.000.000

Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Pemalang	Fasiitasi peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	1 kegiatan	58.000.000	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Pemalang	Fasiitasi peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	1 kegiatan	58.000.000
Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Pemalang	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	92.000.000	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Pemalang	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	92.000.000
Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi	Pemalang	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	90.000.000	Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi	Pemalang	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	90.000.000
Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Pemalang	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	2 kegiatan	140.000.000	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Pemalang	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	2 kegiatan	140.000.000
Program kerjasama informasi dengan mas media		**a. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;,**	**a. 1 Kali dalam setahun,**	**1.252.000.000**	**Program kerjasama informasi dengan mas media**		**a. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;,**	**a. 1 Kali dalam setahun,**	**1.252.000.000**
		b. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media baru seperti website (media online);,	**b. 4 Kali dalam setahun,**				**b. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media baru seperti website (media online);,**	**b. 4 Kali dalam setahun,**	
		c. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;,	**c. 1 Kali dalam setahun,**				**c. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;,**	**c. 1 Kali dalam setahun,**	
		d. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media interpersonal	**d. 1 Kali dalam setahun,**				**d. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media interpersonal**	**d. 1 Kali dalam setahun,**	

			e. 3 Kali dalam setahun					**e. 3 Kali dalam setahun**	
Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Pemalang	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerahmelalui media		750.000.000	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Pemalang	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerahmelalui media		750.000.000
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemalang	Jumlah tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	1 paket, 1 tahun 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran	432.000.000	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pemalang	Jumlah tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia	1 paket, 1 tahun 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran	432.000.000
Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Pemalang	Terlaksananya desiminasi informasi	12 kali	70.000.000	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Pemalang	Terlaksananya desiminasi informasi	12 kali	70.000.000
Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah		**Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pemalang**	**13 Kelompok**	**2.200.350.000**	**Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah**		**Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pemalang**	**13 Kelompok**	**2.200.350.000**
Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA dan swasta lokal	Pemalang	Pembentukan dan rapat koordinasi badan koordinasi kehumasan pemerintah daerah	5 kegiatan	250.200.000	Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA dan swasta lokal	Pemalang	Pembentukan dan rapat koordinasi badan koordinasi kehumasan pemerintah daerah	5 kegiatan	250.200.000
Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Pemalang	Terfasilitasinya pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media	360 upload berita, 500 up load foto dokumentasi	250.000.000	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Pemalang	Terfasilitasinya pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media	360 upload berita, 500 up load foto dokumentasi	250.000.000
Penyusunan standar operasional prosedur komunikasi dan informasi daerah	Pemalang	Terbentuknya SOP komunikasi dan informatika	3 dokumen	105.000.000	Penyusunan standar operasional prosedur komunikasi dan informasi daerah	Pemalang	Terbentuknya SOP komunikasi dan informatika	3 dokumen	105.000.000

Penyusunan manual prosedur penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat	Pemalang	Terbentuknya SOP penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat	3 dokumen	105.000.000	Penyusunan manual prosedur penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat	Pemalang	Terbentuknya SOP penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat	3 dokumen	105.000.000
Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Pemalang	Faslitasi center penguatan komunikasi publik dalam rangka pelayanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center	12 bulan layanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center, 1 paket jasa	300.050.000	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Pemalang	Faslitasi center penguatan komunikasi publik dalam rangka pelayanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center	12 bulan layanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center, 1 paket jasa	300.050.000
Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Pemalang	Terlaksananya fasilitasi KIM dan Forum TI	3 kegiatan	80.000.000	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Pemalang	Terlaksananya fasilitasi KIM dan Forum TI	3 kegiatan	80.000.000
Penyelenggaraan Government CIO	Pemalang	Tersedianya kebijakan, regulasi, dan tata kelola sistem dan transaksielektronik	1 roadmap E-Government dan 1 regulasi	750.000.000	Penyelenggaraan Government CIO	Pemalang	Tersedianya kebijakan, regulasi, dan tata kelola sistem dan transaksielektronik	1 roadmap E-Government dan 1 regulasi	750.000.000
Pemberdayaan dan pemanfaatan e-government	Pemalang	- Meningkatkan budaya pemanfaatan TIK secara cerdas, kreatif dan produktif (CAKAP) untuk penguatan karakterdan budaya bangsa - Tersedianya fasilitasi informasi pembangunan	- 2 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar - 12 bulan fasilitasi informasi pembangunan melalui videotr	360.100.000	Pemberdayaan dan pemanfaatan e-government	Pemalang	- Meningkatkan budaya pemanfaatan TIK secara cerdas, kreatif dan produktif (CAKAP) untuk penguatan karakterdan budaya bangsa - Tersedianya fasilitasi informasi pembangunan	- 2 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar - 12 bulan fasilitasi informasi pembangunan melalui videotron	360.100.000

			on						
Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika		**Persentase SKPD yang telah memiliki website**	**100%**	**4.016.300.000**	**Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika**		**Persentase SKPD yang telah memiliki website**	**100%**	**4.016.300.000**
Penyusunan standar dokumentasi dan publikasi isu-isu strategis daerah	Pemalang	Terbentuknya SOP dokumentasi dan publikasi isu strategis	1 kegiatan	150.000.000	Penyusunan standar dokumentasi dan publikasi isu-isu strategis daerah	Pemalang	Terbentuknya SOP dokumentasi dan publikasi isu strategis	1 kegiatan	150.000.000
Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi	Pemalang	Jumlah informasi strategis dan aktual Nasional melalui Media massa, Media baru, Media tradisional, Media Interpersonal dan Media Luar Ruang yang direproduksi dan didesiminasikan	36 kegiatan desiminasi aktual nasional melalui media massa, media baru, media tradisional, 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang	400.000.000	Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi	Pemalang	Jumlah informasi strategis dan aktual Nasional melalui Media massa, Media baru, Media tradisional, Media Interpersonal dan Media Luar Ruang yang direproduksi dan didesiminasikan	36 kegiatan desiminasi aktual nasional melalui media massa, media baru, media tradisional, 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang	400.000.000
Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	Pemalang	Jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet dan baliho	10.000 poster, 10.000 leaflet	350.000.000	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	Pemalang	Jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet dan baliho	10.000 poster, 10.000 leaflet	350.000.000
Monitoring informasi peristiwa dan pemberitaan aktual	Pemalang	dokumen analisis isu pemberitaan media	2 dokumen	120.000.000	Monitoring informasi peristiwa dan pemberitaan aktual	Pemalang	dokumen analisis isu pemberitaan media	2 dokumen	120.000.000

lintas daerah					lintas daerah				
Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	Pemalang	Terdokumentasikannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360 kegiatan dokumentasi, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video dokumentasi/profil	450.000.000	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	Pemalang	Terdokumentasikannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360 kegiatan dokumentasi, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video dokumentasi/profil	450.000.000
Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	Pemalang	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat	6 rubrik bupati menjawab, 12 iklan display/ kolom, 10 adventorial media cetak, 5 spot tv, 1000 spot radio, 5 adventorial TV, 1 penayangan ILPPD	350.000.000	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	Pemalang	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat	6 rubrik bupati menjawab, 12 iklan display/kolom, 10 adventorial media cetak, 5 spot tv, 1000 spot radio, 5 adventorial TV, 1 penayangan ILPPD	350.000.000

Komunikasi publik melalui dialog interaktiv, radio dan televisi	Pemalang	Terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi	24 dialog interaktif radio, 2 dialog interaktiv TV, 2 dialog sareseh an bupati	750.000.000	Komunikasi publik melalui dialog interaktiv, radio dan televisi	Pemalang	Terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi	24 dialog interaktif radio, 2 dialog interaktiv TV, 2 dialog sareseh an bupati	750.000.000
Pelayanan informasi melalui media online	Pemalang	Terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan web site	1 tahun	50.000.000	Pelayanan informasi melalui media online	Pemalang	Terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan web site	1 tahun	50.000.000
Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Pemalang	Penyusunan daftar informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sengketa informasi	2 perbup DIP, 4 rakor PPID dan PPID pemba ntu, 4 fasilitas i sengket a informa si	260.000.000	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Pemalang	Penyusunan daftar informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sengketa informasi	2 perbup DIP, 4 rakor PPID dan PPID pembant u, 4 fasilitasi sengketa informasi	260.000.000
Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	Pemalang	Terfasilitasinya pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat (LPPL radio swara widuri)	60 kali siaran puasa, 16 kali siaran lebaran, 14 kali siaran arus balik, 36 kali siaran langsun g, 12 bulan siaran berita	1.136.300.000	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	Pemalang	Terfasilitasinya pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat (LPPL radio swara widuri)	60 kali siaran puasa, 16 kali siaran lebaran, 14 kali siaran arus balik, 36 kali siaran langsung, 12 bulan siaran berita	1.136.300.000

Statistik				**885.200.000**	**Statistik**				**885.200.000**
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah		**a. Jumlah dokumen Kabupaten Pemalang Dalam Angka,**	**a. 100 %,**	**885.200.000**	**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**		**a. Jumlah dokumen Kabupaten Pemalang Dalam Angka,**	**a. 100 %,**	**885.200.000**
		b. Jumlah dokumen Kecamatan Dalam Angka,	**b. 100 %,**				**b. Jumlah dokumen Kecamatan Dalam Angka,**	**b. 100 %,**	
		c. Jumlah Dokumen PDRB Kabupaten Pemalang ,	**c. 100 %,**				**c. Jumlah Dokumen PDRB Kabupaten Pemalang ,**	**c. 100 %,**	
		d. Jumlah Dokumen PDRB Kecamatan ,	**d. 100 %,**				**d. Jumlah Dokumen PDRB Kecamatan ,**	**d. 100 %,**	
		e. Jumlah dokumen Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang,	**e. 100 %,**				**e. Jumlah dokumen Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang,**	**e. 100 %,**	
		f. Jumlah dokumen NTP Kabupaten Pemalang ,	**f. 100 %,**				**f. Jumlah dokumen NTP Kabupaten Pemalang ,**	**f. 100 %,**	
		g. Jumlah dokumen Indikator Penting pembangunan daerah Kabupaten Pemalang	**g. 100 %,**				**g. Jumlah dokumen Indikator Penting pembangunan daerah Kabupaten Pemalang**	**g. 100 %,**	
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Pemalang	- Jumlah dokumen Kabupaten Pemalang dalam angka - Jumlah dokumen Kecamatan dalam angka - Jumlah dokumen PDRB Kabupaten Pemalang - Jumlah dokumen PDRB Kecamatan - Jumlah dokumen indeks harga konsumen dan laju inflasi Kabupaten Pemalang - Jumlah dokumen Indikator penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang - Jumlah Dokumen NTP Kabupaten Pemalang	- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokum	715.200.000	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	Pemalang	- Jumlah dokumen Kabupaten Pemalang dalam angka - Jumlah dokumen Kecamatan dalam angka - Jumlah dokumen PDRB Kabupaten Pemalang - Jumlah dokumen PDRB Kecamatan - Jumlah dokumen indeks harga konsumen dan laju inflasi Kabupaten Pemalang - Jumlah dokumen Indikator penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang - Jumlah Dokumen NTP Kabupaten Pemalang	- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen	715.200.000

			en - 1 dokum en - 1 dokum en					- 1 dokumen - 1 dokumen	
Pengelolaan data statistik daerah	Pemalang	Jumlah data yang dikompilasi dan di up date		170.000.000	Pengelolaan data statistik daerah	Pemalang	Jumlah data yang dikompilasi dan di up date		170.000.000
Persandian				**813.000.000**	**Persandian**				**813.000.000**
Program pengembangan persandian/informasi daerah		**Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait**	**100%**	**813.000.000**	**Program pengembangan persandian/informasi daerah**		**Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait**	**100%**	**813.000.000**
Pengamanan komunikasi dan informasi	Pemalang	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	12 bulan	270.000.000	Pengamanan komunikasi dan informasi	Pemalang	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	12 bulan	270.000.000
Penyelenggaraan keamanan informasi	Pemalang	Terselenggaranya pelayanan publik yang aman, andal, terpercaya dan bertanggung jawab serta	12 bulan	543.000.000	Penyelenggaraan keamanan informasi	Pemalang	Terselenggaranya pelayanan publik yang aman, andal, terpercaya dan bertanggung jawab serta	12 bulan	543.000.000
				18.700.000.000					**18.700.000.000**

Berdasarkan hasil review pada tabel 3 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah program yang telah tercantum pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 sebanyaki 12 program dan 82 kegiatan.
2. Berdasarkan usulan dari bidang Pada rancangan akhir RKPD Tahun 2018, maka ditambahkan 1 program yakni Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan yakni Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Dalam hal perencanaan anggaran, masih dapat memenuhi sesuai dengan kebutuhan.
3. Prioritas pendanaan lebih diberikan pada kegiatan-kegiatan rutin yang memang harus terpenuhi untuk berlangsungnya suatu organisasi, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung tercapainya target IKK dan SPM.
4. Tidak terdapat usulan dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi dan SKPD lain pada saat pelaksanaan Forum SKPD maupun Musrenbang, sehingga tidak diusulkan program dari para pemangku kepentingan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informasi

a. Visi dan Kementerian Komunikasi dan Informasi

Visi Kementerian Komunikasi dan Informasi 2015-2019 adalah

"Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu:

1. mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. mewujudkan masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera
5. mewujudkan bangsa yang berdaya saing;dan
6. mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2. Pemerintah Kabupaten Pemalang

a. Visi

Visi Kabupaten Pemalang untuk lima tahun ke depan adalah :

" Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera. "

Penjelasan Visi :

Dalam visi tersebut di atas terdapat empat gagasan pokok yang menjiwai seluruh gerak dan proses pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pemalang, yaitu :

a. **Pemalang Hebat**, Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat merupakan *ultimate goal* yang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi Pemalang yang berdaulat, berjatidiri, mandiri dan sejahtera. **Pemalang Hebat** juga menjadi *tagline* pembangunan daerah dalam memacu semangat, percepatan dan sinergitas para *stakeholders* terkait dalam mengupayakan perwujudan pembangunan Pemalang.
b. **Berdaulat** diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan supremasi hukum.
c. **Berjatidiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang memiliki keunggulan yang berbasis *local wisdom/local value* dengan menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati.
d. **Mandiri** diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

e. **Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Pencapaian Visi "Terwujudnya Pemalang Hebat yang Berdaulat, Berjatidiri, Mandiri dan Sejahtera", ditempuh melalui 7 (tujuh) misi sebagai berikut :

a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah, mufakat dan gotong royong
b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan, perlindungan sosial dan anak
c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
d. Meningkatkan sarana dan prasarana dasar yang merata serta memperkuat sentra-sentra produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan daya saing daerah
e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan saling menghormati
f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum kemudahan investasi dan daya saing daerah
g. Menumbuhkan kembali Budaya Asli Daerah Kabupaten Pemalang sebagai landasan pembentukan jati diri Pemalang untuk memperkokoh kepribadian bangsa

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Bupati Pemalang. Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pencapaian visi dan keseluruhan Misi Kabupaten Pemalang.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang dituntut untuk mampu mengejawantahkan Visi Pembangunan Pemalang 2016-2021, melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Dan Informatika.

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika sejalan dengan **misi 1 (pertama)** Kabupaten Pemalang yakni *"Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong", dan* ***misi*** **yang ke 6** (Enam) yaitu *Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik, penegakan supermasi hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah* .

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Berdasarkan tugas dan fungsi yang diemban Dinas Komunikasi dan Informatika dengan segala isu-isu serta permasalahannya yang telah dipaparkan dalam BAB II, maka Renja Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan dan sasaran agar visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun dapat tercapai.

1. Tujuan dan Sasaran

   Rumusan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikasi sasaran	Satuan	Kondisi Awal (2015)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas jaringan telekomunikasi dan Informatika	Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi	Cakupan pelayanan TI bagi masyarakat	Titik Hot spot	Na	3	6	9	12	14	14

guna menunjang pelayanan publik										

Tabel 3.2
Tujuan, sasaran dan Indikator beserta program Tahun 2018

Tujuan	**Sasaran**	**Indikator Kinerja sasaran**	**Satuan**	**Target Tahun 2018**	**Nama Program**	**Indikator program**	**Target Kinerja program Tahun 2019**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Nilai LKJIP	Nilai	c	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kualitas Aparatur Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD Pogram Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya pelayanan adminsitrasi perkantoran Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Meningkatnya kualitas aparatur Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran SKPD Meningkatnya kualitas laporan capaian kinerja dan keuangan	60% 60% 60% 60% 60%
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik							

	Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.	Prosentase layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu - Tingkat pemenuhan informasi publik pada website Pemalangkab.go.id - Pemeringkatan keterbukaan Infomasi Publik -	Persen Persen Peringkat	60% 80% 14	Program Penguatan Kelembagaan dalam Komunikasi dan Informasi Daerah Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Cakupan pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang Prosentase Website OPD yang aktif update data Prosentase OPD yang memiliki Website Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan elektronik	14 kelompok 80% 100% 80%
	Memperkuat kualitas Aparat Komunikasi Informatika.	- Prosentase Aparatur Sipil yang trampil di bidang komunikasi dan informatika	Persen	60%	Program Fasilitasi peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika	Prosentase SKPD yang telah memiliki website Prosentase ASN yang trampil di bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika	72% 80%
	Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik	- Rasio berita positif dan negatif di media mainstream tentang Pemerintah Kabupaten Pemalang	Persen	60:40	Program kerjasama informasi dengan media massa	- Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah , radio dan televisi - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan	4 kali 4 kali

						pendistribusian informasi nasional melalui baru (on line) - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media tradisional - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media interpersonal - Jumlah pelaksanaan Diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media luar ruang	1 kali 3 kali
					Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika	Prosentase OPD yang memiliki Website Meningkatnya kualitas informasi melalui media cetak dan elektronik	100% 80%
Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik	- Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan sosialisasi literasi media	Kelompok	14	Program Penguatan Kelembagaan dalam pengelolaan informasi dan komunikasi daerah	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Pemalang	13 kelompok

	Terwujudnya pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.	- Tersedianya Data Center dan NOC dengan berstandar - Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks PEGI) - Pemenuhan Standar Manajemen Pengamanan Informasi	Persen Nilai persen	60% 3 40%	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa Program Pengembangan Persandian/Informasi Daerah	- Tersedianya Data Center - Cakupan Layanan BTS - Jumlah stasiun radio Prosentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	80% 95% 12 100%
	Terintegrasinya data (interoperabilitas sistem informasi) antar seluruh SKPD/OPD	- Prosentase data statistic antar SKPD/ OPD yang terintegrasi	Persen	60	Program Pengembangan Data/Statistik/Informasi daerah	- Jumlah dokumen Kabupaten dalam angka - Jumlah dokumen kecamatan dalam angka - Jumlah dokumen PDRB kecamatan - Jumlah dokumen Indeks Harga konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten pemalang	100% 100% 100% 100%

						- Jumlah dokumen NTP Kabupaten pemalang - Jumlah dokumen indikator penting pembangunan daerah kabupaten pemalang	100% 100%

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara itu kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan bagaimana cara mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD Kabupaten Pemalang yang menjadi tugas dan fungsi Strategi dan Arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang 5 (lima) tahun kedepan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Berdasarkan analisis dari pembobotan dengan menggunakan metode profesional judgement, maka terdapat 5 (lima) strategi pilihan yakni sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.
2. Menerapkan tata kelola E Goverment dan Pelayanan Informasi Publik.
3. Mengintegrasikan data TIK dan data pelayanan publik.
4. Membangun infrastruktur jaringan TIK dan komunikasi publik.
5. Pemberdayaan Masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang mendasarkan pada tujuan RPJMD adalah sebagai berikut:

Tujuan 1:

Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangungan daerah, serta pelaporan kinerja pemerintah daerah

Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan pelaporan kinerja pemerintah daerah

Strategi:

Meningkatkan kualitas rencana pembangunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparatur perencana mengenai perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja pembangunan daerah.

Kebijakan:

- Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta penyusunan berbagai laporan kinerja sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai wujud pelayanan publik yang prima dan perbaikan citra publik

Sasaran 1: Meningkatnya layanan informasi dan aspirasi publik.

Strategi:

- Pemanfatan TIK dalam kegiatan pelayanan publik secara transparan, cepat dan handal.

Kebijakan:

- Restrukturasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu di setiap OPD.
- Meningkatkan peran PPID dalam menghimpun dan mengelola data
- Menyusun SOP Standar Layanan Informasi Publik.
- Membekali sarana dan prasarana teknologi informasi bagi PPID untuk kebutuhan layanan informasi publik
- Menyediakan sarana informasi publik.
- Meningkatkan kualitas dan kapasitan layanan infpormasi publik.
- Menyediakan konten layanan informasi publik.
- Membuka layanan partisipasi, aspirasi, dan pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Pengembangan layanan informasi.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas Aparatur di bidang Komunikasi Informatika

Strategi:

Meningkatkan kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan:

- Meningkatkan keahlian dan keterampilan Aparatur Sipil Negara di setiap SKPD/OPD di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan prima

Sasaran 3: Membangun Citra Positif Pemerintah Kabupaten Pemalang di Mata Publik

Strategi : Optimalisasi dan intensifikasi pemanfaatan media informasi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Kebijakan:

- Meningkatkan peran PPID sebagai juru bicara lembaga
- Meningkatkan kerjasama informasi dengan media massa
- Meningkatkan kualitas media milik pemerintah daerah
- Penguatan literasi media untuk meningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya

Sasaran 4 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi

Strategi:

Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi untuk diseminasi program pembangunan, dan meningkatkan pelayanan publik.

Kebijakan:

- Penguatan literasi media untuk meningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya
- Pemberdayaan masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan 2 :

Meningkatkan kualitas jaringan telekomunikasi dan informatika guna menunjang pelayanan publik

Sasaran : Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Strategi: Mengembangkan sarana dan prasarana TIK untuk mewujudkan data terpadu.

Kebijakan:

- Membangun data center dan NOC.
- Pengembangan jaringan FO
- Menyusun standarisasi perangkat lunak dan perangkat keras
- Menyusun standar basis data
- Menyusun mekanisme interoperabilitas antar data.
- Menyediakan server basis data dan aplikasi
- Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile
- Melakukan tuning (optimalisasi) aplikasi dan basis data untuk mempercepat aksesibilitas.
-

Sasaran 6: Terintegrasinya data antar SKPD/OPD

Strategi: Mengoptimalkan kualitas data dan informasi melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kebijakan:

- Pemanfaatan inovasi teknologi informasi dan komunikasi dan penguatan statistic sectoral

- Menyediakan data yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

Program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Tahun 2016 - 2021 yang bereferensi pada RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021. Program dan kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai arah kinerja SKPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas serta terjaminnya kesinambungan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Pemalang dan OPD yang menjadi bidang tugas.

Disamping kedudukan yang demikian, program dan kegiatan Dinas Tahun 2018 diharapkan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat serta tolok ukur pencapaian arah kebijakan, visi dan misi Bupati Pemalang yang tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021.

Dari prioritas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang menetapkan sasaran seperti tersebut di atas. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut, diperlukan dukungan oleh segenap komponen organisasi yang terintegrasi dalam rencana program dan kegiatan terpadu.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang pada Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan:

a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas
d. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
g. Perbaikan peralatan kerja
h. Penyediaan alat tulis kantor
i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
k. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

l. Penyediaan bahan logistik kantor
m. Penyediaan peralatan rumah tangga
n. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
o. Penyediaan makanan dan minuman
p. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
q. Penyediaan jasa keamanan

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan:

a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
b. Pengadaan peralatan gedung kantor
c. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
d. Pengadaan komputer dan perlengkapannya
e. Pengadaan alat-alat elektronik
f. Pengadaan mebeleur
g. Pengadaan peralatan gedung kantor
h. Pengadaan lemari besi dan feeling kabinet
i. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
j. Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional
k. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
l. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
m. Rehab sedang/berat gedung kantor
n. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya
o. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat elektronik
p. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri
q. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Kantor LPPL Swara Widuri
r. Pemeliharaan peralatan studio LPPL Swara Widuri

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

kegiatan:

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
b. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
c. Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan:

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan:

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan prognosis
d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
e. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

5. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD

a. Penyusunan data base perencanaan SKPD
b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD

6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

kegiatan :

a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi;
b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi;
c. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi;
d. Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
e. Pengkajian dan Pengembangan sistem Komunikasi dan Informasi;
f. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi;
g. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
h. Fasilitasi Pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik
k. Penyelenggaraan ekosistem smart city
l. Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagai pakai

m. Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah

n. Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi

7. Program Fasilitasi Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi

kegiatan :

a. Asistensi/bimbingan Teknis bidang manajemen komunikasi publik

b. Asistensi/bimbingan Teknis bidang Teknis Jurnalistik

c. Asistensi/bimbingan Teknis bidang analisis data

d. Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi

e. Sosialisasi Kehumasan bagi aparatur Pemerintah Kabupaten Pemalang

8. Program Kerja Sama Informasi dengan Mass Media

kegiatan :

a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah;

b. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat.

9. Program Penguatan Kelembagaan dalam Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Daerah

kegiatan :

a. Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA, dan swasta

b. Revitalisasi pendayagunaan media center daerah

c. Penyusunan Standar Operasional Prosedur komunikasi dan informasi daerah

d. Penyusunan Manual Prosedur penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat

e. Penguatan Komunikasi Publik melalui website dan media center

f. Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik

g. Penyelenggaraan Goverment CIO

h. Pemberdayaan dan Pemanfaatan E-Goverment

10. Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika,

kegiatan :

a. Pelayanan Informasi melalui Media Online;

b. Pengelolaan dan Inventarisasi Data dan Penyajian Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah.

c. Penyusunan Standar dokumentasi dan publikasi isu-isu strategis

d. Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi

e. Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet,baleho dll

f. Monitoring informasi, peristiwa dan pemberitaan daerah

g. Dokumentasi/publikasi program/kegiatan SKPD

h. Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (advertorial)

i. Komunikasi Publik melalui melalui dialog interaktif, radio dan televisi

j. Pelayanan informasi melalui media on line

k. Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah

l. Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat

11. Program Pengembangan Data/Statistik daerah

a. Penyusunan dan pengumpulan data Statistik Daerah

b. Pengelolaan data statistik daerah

12. Program Pengembangan Persandian/informasi daerah

a. Pengamanan komunikasi dan informasi

b. Penyelenggaraan keamanan informasi

Tabel 3.3

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018
Kabupaten Pemalang

SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode				Urusan/bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program kegiatan	Rencana Tahun 2018 (Tahun Rencana)					Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2019	
					Indikator Kinerja Program/Kegiatan	**Lokasi**	**Target Capaian Kinerja**	Kebutuhan dana/pagu indikatif	**Sumber dana**		**Target Capaian Kinerja**	Kebutuhan dana/pagu indikatif
1				**2**	**3**		**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
				DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				**18.700.000.000**				**18.188.000.000**
2	10			**Komunikasi dan Informatika**				17.001.800.000	APBD			**16.418.000.000**
2	**10**	**1**		**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan**		**12 bulan**	**1.011.230.000**	APBD		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran setiap bulan	**1.005.000.000**
2	10	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat terkirim selama 1 tahun		3500 surat	50.000.000	APBD		3500 surat, 12 bulan	50.000.000
2	10	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan telepon, air dan listrik selama 12 bulan		12 bulan	200.000.000	APBD		3 jenis 12 bln	250.000.000

2	10	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang ada tersedia selama 1 tahun	12 bulan	20.000.000	APBD		1 paket, 12 bulan.	25.000.000
2	10	1	6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan yang dipelihara dan berijin selama 1 tahun	12 bulan	20.000.000	APBD		9 kendaraan, 12 bulan	35.000.000
2	10	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah laporan yang tersusun tepat	12 bulan	130.000.000	APBD		170	150.000.000
2	10	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang terpenuhinya selama 1 tahun	12 bulan	40.000.000	APBD		1 tahun	50.000.000
2	10	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	12 bulan	25.000.000	APBD		1 tahun .	30.000.000
2	10	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	40.000.000	APBD		1 paket, 1 th	20.000.000
2	10	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bahan cetakan dan penggandaan yang tersedia selama 1 tahun	1 paket	30.000.000	APBD		6 paket	35.000.000
2	10	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	76.000.000	APBD		6 jenis	95.000.000
2	10	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	43.000.000	APBD		1 tahun	45.000.000
2	10	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	1 paket	30.000.000	APBD		1 tahun	45.000.000

2	10	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	47.230.000	APBD		2 jenis, 12 bulan	50.000.000
2	10	1	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	32.000.000	APBD		1 tahun	35.000.000
2	10	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia selama 1 tahun	12 bulan	48.000.000	APBD		12 bulan	50.000.000
2	10	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah	Jumlah rapat koodinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah yang dapat dihadiri/diikuti	12 bulan	150.000.000	APBD		1 tahun	170.000.000
2	10	1	19	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah tenaga keamanan yang terpenuhi tersedia selama 1 tahun	12 bulan	30.000.000	APBD		12 bulan.	40.000.000
2	**10**	**2**		**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**terpenuhinya kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik setiap bulan**	**12 bulan**	**1.540.120.000**	APBD			**1.267.000.000**
2	10	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dapat disediakan	1 roda 4, 8 kendaraan roda 2	650.000.000	APBD		1 roda 4, 4 roda 2	300.000.000
2	10	2	7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dapat disediakan	1 paket	38.120.000	APBD		1 jenis, 1 keg	40.000.000
2	10	2	9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 paket	67.000.000	APBD		1 pake	75.000.000
2	10	2	10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpenuhi	1 paket	49.500.000	APBD		1 paket	52.000.000
2	10	2	11	Pengadaan komputer dan perlengkapanya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang dapat disediakan	4 laptop	47.000.000	APBD		2 jenis (komputer PC 2, Scanner)	40.000.000

2	10	2	12	Pengadaan alat- alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang tersedia	1 paket	83.000.000	APBD		2 jenis (TV, sound system)	100.000.000
2	10	2	14	Pengadaan lemari besi dan feling cabinet	Jumlah lemari besi dan feeling cabinet	2 lemari besi	58.000.000	APBD		2 jenis (lemari, foiling kabinet	25.000.000
2	10	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara selama 1 tahun	12 bulan	122.000.000	APBD		2 gedung	130.000.000
2	10	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara selama 1 tahun	12 bulan	89.500.000	APBD		6 roda 4 10 roda 2	120.000.000
2	10	2	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan yang dipelihara	12 bulan	50.000.000	APBD		1 tahun	60.000.000
2	10	2	30	Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapanya	Jumlah komputer dan perlengkapannya yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	47.000.000	APBD		1 tahun	60.000.000
2	10	2	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat- alat elektronik	Jumlah alat-alat elektronik yang membutuhkan pemeliharaan	12 bulan	34.000.000	APBD		1 paket	40.000.000
2	10	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 paket	35.000.000	APBD		1 paket	40.000.000
2	10	2	46	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri	Jumlah gedung kantor LPPL Swara Widuri yang dipelihara	12 bulan	60.000.000	APBD		1 tahun	85.000.000
2	10	2	47	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor LPPL Swara Widuri	Jumlah perlengkapan gedung kantor LPPL Swara Widuri yang dipelihara	12 bulan	50.000.000	APBD		1 tahun	50.000.000

2	10	2	48	Pemeliharaan rutin peralatan studio LPPL Swara Widuri	Jumlah peralatan studio LPPL Swara Widuri yang dipelihara yang membutuhkan pemeliharaan	1 paket	60.000.000	APBD		1 tahun	50.000.000
2	**10**	**3**		**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Prosentase tingkat kedisiplinan ASN**	**100%**	**46.000.000**	APBD		1 tahun	50.000.000
2	10	3	2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang terpenuhi	50 stel	46.000.000	APBD		1 tahun	50.000.000
2	**10**	**5**		**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Prosentase ASN yang mengikuti diklat terhadap jumlah ASN**	**3.63%**	**406.000.000**	APBD			**400.000.000**
2	10	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 kegiatan	100.000.000	APBD		6 kegiatan	120.000.000
2	10	5	3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bintek yang diikuti dan pelatihan	2 kegiatan	206.000.000	APBD		3 kegiatan	160.000.000
2	10	5	5	Pengiriman pegawai pada seminar workshop terkait dengan pelaksanaan tupoksi	Terkirimnya pegawai pada workshop	1 tahun	100.000.000	APBD		50 orang	120.000.000
2	**10**	**6**		**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan yang tersedia**	**60%**	**214.000.000**	APBD			**245.000.000**
2	10	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan yang tersusun baik dan benar	3 laporan	94.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000

2	10	6	2	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran yang tersusun tepat waktu	1 laporan	15.000.000	APBD		1 Laporan	15.000.000
2	10	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun tepat waktu	1 laporan	15.000.000	APBD		5 kegiatan	95.000.000
2	10	6	9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah laporan monev	4 laporan	90.000.000	APBD		12 bulan	120.000.000
2	**10**	**9**		**Program peningkatan perencanaan dan penganggaran SKPD**		**60%**	**271.000.000**	APBD			**280.000.000**
2	10	9	1	Penyusunan data base perencanaan SKPD	Tersedianya data perencanaan	3 dokumen	131.000.000	APBD		7 dok	140.000.000
2	10	9	2	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD yang tersusun dengan baik dan benar	3 dokumen	140.000.000	APBD		4 dokumen (Renja dan perub Renja,RKA/DPA, RKAP/DPPA dan Renstra)	140.000.000
2	**10**	**15**		**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**		**a. 40 %,**	**5.605.800.000**	APBD			**5.995.000.000**
					b. Jumlah Penyiaran Radio/Jumlah pengawasan isi siaran Radio,	**b. 11 Stasiun,**					
					c. Cakupan layanan BTS	**c. 85 %,**					
						,					
						56%					

2	10	15	4	Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Tersedianya data survei indeks kepuasan masyarakat	1 kegiatan	47.000.000	APBD		1 kegiatan	50.000.000
2	10	15	5	Pengadaan alat sudio dan komunikasi	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	2 kamera DLSR, 1 kamera video shooting	95.000.000	APBD		1 kamera shooting	50.000.000
2	10	15	6	Pengkajian dan pengembangan sistem informasi	Tersedianya data base sistem informasi	1 dokumen	65.800.000	APBD		1 dok	125.000.000
2	10	15	7	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Tersedianya data base rencana strategis komunikasi publik	2 dokumen	130.000.000	APBD		2 dok	150.000.000
2	10	15	8	Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi	Terpeliharanya peralatan studio dan komunikasi	12 bulan	60.000.000	APBD		12 bulan.	120.000.000
2	10	15	11	Fasilitasi pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	Tersedianya layanan pengadaan	layanan selama 1 tahun	350.000.000	APBD		1 tahuh	350.000.000
2	10	15	12	Penyelenggaraan ekosistem Smart City	Tersedianya aplikasi dan infrastruktur untuk pemerintahan maupun publik guna mewujudkan smart city	10 aplikasi, 14 titik hotspot, 1 command center	2.030.000.000	APBD		10 aplikasi, 12 titik hostpot, 1 command center	2.400..000.000
2	10	15	13	Pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi berbagi pakai	Terkoneksinya aplikasi-aplikasi pemerintahan untuk mewujudkan aplikasi berbagi pakai	aplikasi 1 kegiatan pelatihan	1.573.000.000	APBD		1 aplikasi, 1 pelatihan	1.500.000.000
2	10	15	14	Pengelolaan nama domain dan sub domain daerah	- Terwujudnya tata kelola domain dan sub domain pemerintah daerah yang aman dan handal - Pelatihan interoperabilitas dan interkoneksi	- 20 website dan 2 sertifikasi keamanan website - 2 website OPD	410.000.000	APBD		pelatih20 website dan 2 sertifikasi keamanan, website 2	400.000.000

2	10	15	15	Pengelolaan infrastruktur e-government, data dan informasi terintegrasi	Terintegrasinya data dan infrastruktur komunikasi	- Terpusatnya data base	845.000.000	APBD		terpusatnya data base	850.000.000
2	**10**	**16**		**Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi**	**Persentase SKPD telah memiliki website (%)**	**56%**	**439.000.000**	APBD			**440.000.000**
2	10	16	3	Asistensi/bimbingan teknis bidang manajemen komunikasi publik	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	59.000.000	APBD		1 kegiatan	60.000.000
2	10	16	4	Asistensi/bimbingan teknis bidang teknik jurnalistik	Fasiitasi peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam bidang jurnalistik	1 kegiatan	58.000.000	APBD		1 kegiatan	60.000.000
2	10	16	5	Asistensi/bimbingan teknis bidang analisis data	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	92.000.000	APBD		1 kegiatan	90.000.000
2	10	16	6	Asistensi/bimbingan teknis bidang komunikasi organisasi	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti bintek	1 kegiatan	90.000.000	APBD		1 kegiatan	90.000.000
2	10	16	11	Sosialisasi kehumasan bagi aparatur pemerintah kabupaten pemalang	Jumlah aparatur pemerintah daerah yang mengikuti sosialisasi kehumasan	2 kegiatan	140.000.000	APBD		2 kegiatan	140.000.000
2	**10**	**17**		**Program kerjasama informasi dengan mas media**	**a. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media massa seperti majalah, radio, dan televisi;,**	**a. 1 Kali dalam setahun,**	**1.252.000.000**	APBD			**1.320.000.000**

					b. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media baru seperti website (media online);,	**b. 4 Kali dalam setahun,**			0		
					c. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media tradisional seperti pertunjukan rakyat;,	**c. 1 Kali dalam setahun,**					
					d. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional Melalui Media interpersona	**d. 1 Kali dalam setahun,**					
						e. 3 Kali dalam setahun					
2	10	17	1	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah penyebarluasan informasi pembangunan daerahmelalui media	1 paket, 1 tahun 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran	750.000.000	APBD		5 paket	800.000.000
2	10	17	2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah tersebarnya informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerbitan majalah, tabloid, koran dan terlaksananya pelayanan multimedia		432.000.000	APBD		1 paket 1 tahun, 3 edisi majalah, 3 edisi tabloid, 12 edisi koran,	450.000.000

2	10	17	3	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Terlaksananya desiminasi informasi	12 kali	70.000.000	APBD		12 kali	70.000.000
2	**10**	**18**		**Program penguatan kelembagaan dalam pengelolaan komunikasi dan infromasi daerah**	**Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Kabupaten Pemalang**	**13 Kelompok**	**2.200.350.000**	APBD			**1.580.000.000**
2	10	18	2	Koordinasi bidang komunikasi dan informasi lintas SKPD, lintas instansi vertikal, BUMDA dan swasta lokal	Pembentukan dan rapat koordinasi badan koordinasi kehumasan pemerintah daerah	5 kegiatan	250.200.000	APBD		6 kegiatan	250.000.000
2	10	18	5	Revitalisasi pendayagunaan media center daerah	Terfasilitasinya pelayanan informasi dan komunikasi publik melalui media	360 upload berita, 500 up load foto dokumentasi	250.000.000	APBD		300 upload berita, 500 upload foto dok	250.000.000
2	10	18	6	Penyusunan standar operasional prosedur komunikasi dan informasi daerah	Terbentuknya SOP komunikasi dan informatika	3 dokumen	105.000.000	APBD		0	0
2	10	18	9	Penyusunan manual prosedur penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat	Terbentuknya SOP penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat	3 dokumen	105.000.000	APBD		0	0
2	10	18	10	Penguatan komunikasi publik melalui website dan SMS center	Faslitasi center penguatan komunikasi publik dalam rangka pelayanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center	12 bulan layanan aduan masyarakat melalui website dan SMS center, 1 paket jasa	300.050.000	APBD		12 bulan layanan aduan masya melaui website dan SMS center, 1 paket jasa	300.000.000
2	10	18	11	Penguatan kelembagaan pengelolaan informasi publik	Terlaksananya fasilitasi KIM dan Forum TI	3 kegiatan	80.000.000	APBD		4 keg	100.000.000

2	10	18	15	Penyelenggaraan Government CIO	Tersedianya kebijakan, regulasi, dan tata kelola sistem dan transaksielektronik	1 roadmap E-Goverment dan 1 regulasi	750.000.000	APBD		4 rakor goverment CIO	300.000.000
2	10	18	16	Pemberdayaan dan pemanfaatan e-government	- Meningkatkan budaya pemanfaatan TIK secara cerdas, kreatif dan produktif (CAKAP) untuk penguatan karakterdan budaya bangsa - Tersedianya fasilitasi informasi pembangunan	- - 2 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar - 12 bulan fasilitasi informasi pembangunan melalui videotron	360.100.000	APBD		1 vediotron2 kegiatan sosialisasi pemanfaatan TIK untuk pelajar, 12 bulan fasilitas informasi pembangunan	380.000.000
2	**10**	**19**		**Program peningkatan tata laksana komunikasi dan informatika**	**Persentase SKPD yang telah memiliki website**	**100%**	**4.016.300.000**	APBD			**3.886.000.000**
2	10	19	1	Penyusunan standar dokumentasi dan publikasi isu-isu strategis daerah	Terbentuknya SOP dokumentasi dan publikasi isu strategis	1 kegiatan	150.000.000	APBD		0	0
2	10	19	3	Penyediaan dan pendayagunaan teknologi informatika dan komunikasi	Jumlah informasi strategis dan aktual Nasional melalui Media massa, Media baru, Media tradisional, Media Interpersonal dan Media Luar Ruang yang direproduksi dan didesiminasikan	36 kegiatan desiminasi aktual nasional melalui media massa, media baru, media tradisional, 360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang	400.000.000	APBD		30 kegiatan desinimasiaktual nasioal melalui media massa, media baru media tradisional360 hari desiminasi melalui media baru dan 12 kegiatan media luar ruang	400.000.000

2	10	19	5	Pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet, baleho dll	Jumlah pelayanan informasi kebijakan daerah melalui poster, leaflet dan baliho	10.000 poster, 10.000 leaflet	350.000.000	APBD		10000 poster, 10000 leaflet	350.000.000
2	10	19	6	Monitoring informasi peristiwa dan pemberitaan aktual lintas daerah	dokumen analisis isu pemberitaan media	2 dokumen	120.000.000	APBD		2 dokumen	120.000.000
2	10	19	7	Dokumentasi dan publikasi program/ kegiatan SKPD	Terdokumentasikannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah	360 kegiatan dokumentasi, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video dokumentasi/profil	450.000.000	APBD		380 dok, 200 buku himpunan sambutan bupati, 200 buku kliping berita harian, 4 video	450.000.000
2	10	19	8	Pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat (adventorial)	Tersedianya pemberian informasi publik melalui iklan layanan masyarakat	6 rubrik bupati menjawab, 12 iklan display/kolom, 10 adventorial media cetak, 5 spot tv, 1000 spot radio, 5 adventorial TV, 1 penayangan ILPPD	350.000.000	APBD		8 rubrik bupati menjawab,12 iklan display/kolom, 10 advertorial media cetak,5 5 spot TV, 1000 spot radio, 5 advertorial TV, 1 penayangan	350.000.000

2	10	19	9	Komunikasi publik melalui dialog interaktiv, radio dan televisi	Terfasilitasinya komunikasi publik melalui dialog interaktif, radio dan televisi	24 dialog interaktif radio, 2 dialog interaktiv TV, 2 dialog saresehan bupati	750.000.000	APBD		24 dialog interaktif radio, 2 dialog interaktif TV, 2 dialog sarasehan bupati	750.000.000
2	10	19	11	Pelayanan informasi melalui media online	Terpenuhinya pengelolaan dan pengembangan web site	1 tahun	50.000.000	APBD		1 tahun	50.000.000
2	10	19	12	Pengelolaan dan inventarisasi data dan penyajian informasi kebijakan pemerintah daerah	Penyusunan daftar informasi publik, rakor PPID dan PPID pembantu dan sengketa informasi	2 perbup DIP, 4 rakor PPID dan PPID pembantu, 4 fasilitasi sengketa informasi	260.000.000	APBD		2 perbup DIP, 4 rakor PPID, 4 fasilitas sengketa informasi	280.000.000
2	10	19	14	Pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat	Terfasilitasinya pengelolaan program radio dan televisi daerah untuk masyarakat (LPPL radio swara widuri)	60 kali siaran puasa, 16 kali siaran lebaran, 14 kali siaran arus balik, 36 kali siaran langsung, 12 bulan siaran berita	1.136.300.000	APBD		60 kali siaran puasa, 16 kali siaran lebaran, 14 kali siaran arus balik, 36 kali siaran langsung, 12 bulan	1.136.000.000
2	14			**Statistik**			885.200.000	APBD			**950.000.000**
2	**14**	**15**		**Program pengembangan data/informasi/statistik daerah**	**a. Jumlah dokumen Kabupaten Pemalang Dalam Angka,** **b. Jumlah dokumen Kecamatan Dalam Angka,**	**a. 100 %,** **b. 100 %,**	**885.200.000**				**950.000.000**

					c. Jumlah Dokumen PDRB Kabupaten Pemalang ,	**c. 100 %,**					
					d. Jumlah Dokumen PDRB Kecamatan ,	**d. 100 %,**					
					e. Jumlah dokumen Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi Kabupaten Pemalang,	**e. 100 %,**					
					f. Jumlah dokumen NTP Kabupaten Pemalang ,	**f. 100 %,**					
					g. Jumlah dokumen Indikator Penting pembangunan daerah Kabupaten Pemalang ,	**g. 100 %,**					
					PERSANDIAN						

2	14	15	1	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah	- Jumlah dokumen Kabupaten Pemalang dalam angka - Jumlah dokumen Kecamatan dalam angka - Jumlah dokumen PDRB Kabupaten Pemalang - Jumlah dokumen PDRB Kecamatan - Jumlah dokumen indeks harga konsumen dan laju inflasi Kabupaten Pemalang - Jumlah dokumen Indikator penting Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang - Jumlah Dokumen NTP Kabupaten Pemalang	- 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen	715.200.000	APBD		1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 dok 1, dok, 1 dok, 1 dok1, dok	750.000.000
2	14	15	5	Pengelolaan data statistik daerah	Jumlah data yang dikompilasi dan di up date	5	170.000.000	APBD		14 k3giatan, 36 berkas, 5 sektor, 1 website	200.000.000
2	15			**Persandian**			813.000.000				**820.000.000**
2	**15**	**15**		**Program pengembangan persandian/informasi daerah**	**Persentase informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait**	**100%**	**813.000.000**	APBD		**12 bulan**	**820.000.000**
2	15	15	1	Pengamanan komunikasi dan informasi	Terwujudnya penyelenggaraan keamanan informasi	12 bulan	270.000.000	APBD		12 bulan	270.000.000

2	15	15	2	Penyelenggaraan keamanan informasi	Terselenggaranya pelayanan publik yang aman, handal, terpercaya dan bertanggungjawab	12 bulan	543.000.000	APBD		12 bulan	550.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018. Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Urusan komunikasi diprioritaskan pada penyediaan layanan internet, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Pemalang, 3 Juli 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN DISKOMINFO PEMALANG

Drs.NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19610821 198903 1 003

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang Tahun 2018 mengacu pada RPJMD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 - 2021 dan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2018. Renja ini diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Pemalang, sehingga target kinerja pada akhir tahun periode Renstra dapat tercapai.

Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Urusan komunikasi diprioritaskan pada penyediaan layanan internet, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini merupakan program dan kegiatan yang bersifat indikatif, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat tergantung pada kondisi, regulasi, prioritas, dan ketersediaan anggaran pemerintah daerah pada tahun anggaran bersangkutan.

Pemalang, 3 Juli 2017

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN DISKOMINFO PEMALANG

Drs.NUGROHO BUDI RAHARJO, MM
Pembina Tk.I

NIP. 19610821 198903 1 003